

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).

Tantangan Media Sosial Dalam Demokrasi Indonesia

Zulfitriani¹, Rosmiantin², Nurul Isnaini³

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, zulfitriani592@gmail.com.

²Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, rosmiantin107@gmail.com

³Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, isnaininurul643@gmail.com

Abstrak: Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, kehadiran media sosial sebagai ruang publik digital menghadirkan tantangan baru terhadap kualitas demokrasi, terutama menjelang Pemilu 2024. Media sosial yang semula diharapkan menjadi sarana transparansi dan partisipasi politik justru berkembang menjadi medium penyebaran disinformasi yang masif. Selain itu, algoritma media sosial membentuk ruang gema dan gelembung filter yang mempersempit keberagaman informasi dan memperkuat polarisasi politik antarwarga. Fenomena buzzer politik dan pasukan siber turut menciptakan manipulasi opini publik secara sistematis, sehingga ruang diskusi digital kehilangan objektivitas dan netralitas. Maraknya hoaks politik juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi serta melemahkan legitimasi proses pemilu. Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat juga memperburuk penyebaran informasi yang tidak akurat dan menghambat partisipasi politik yang rasional. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji secara menyeluruh kelima tantangan tersebut. Hasilnya menegaskan bahwa demokrasi digital membutuhkan penguatan literasi digital, pengawasan konten daring, serta regulasi informasi publik guna memastikan keberlangsungan demokrasi yang sehat dan substansial di era media sosial.

Kata Kunci: Media Sosial, Disinformasi, Polarisasi Politik, Literasi Digital, *Echo Chamber*

*Correspondence Address: Jzulfitriani592@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	31 May 2025	31 May 2025	30 November 2025

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan perubahan besar dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Indonesia, terutama melalui peran media sosial. Sebagai ruang publik virtual yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa batas geografis dan waktu, media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga bertransformasi menjadi medium politik yang sangat berpengaruh. Dalam konteks demokrasi, media sosial seharusnya berfungsi sebagai wahana distribusi informasi yang adil, transparan, dan inklusif. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa media sosial kerap menjadi ruang yang bising oleh narasi sepihak, kampanye negatif, dan polarisasi antar pendukung politik. Kemudahan akses tanpa regulasi yang ketat justru membuka celah terjadinya penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian, yang pada akhirnya menggerus nilai-nilai deliberatif dalam sistem demokrasi. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah media sosial benar-benar memperkuat demokrasi, atau justru menjadi tantangan baru yang mengancam kualitas demokrasi di Indonesia?

Sejumlah studi akademik mengungkapkan bahwa media sosial memiliki peran bertentangan dalam demokrasi modern. Menurut Sitorus et al. (2024), media sosial memperkuat polarisasi politik melalui mekanisme algoritma yang menyaring informasi sesuai preferensi pengguna, sehingga mempersempit ruang diskusi yang inklusif. Ayunda et al. (2024) menyatakan bahwa fenomena echo chamber di media sosial menyebabkan masyarakat hanya terpapar narasi yang mendukung pandangan mereka sendiri, sementara informasi yang berbeda dianggap sebagai ancaman. Fajri (2023) menambahkan bahwa media sosial juga menjadi wahana subur bagi politik identitas, yang mengeksploitasi perbedaan agama, ras, dan suku sebagai strategi elektoral, tetapi berpotensi menimbulkan perpecahan sosial. Bahkan Fernando et al. (2022) memperingatkan bahwa apabila tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai, masyarakat akan mudah terjebak dalam arus informasi yang manipulatif, yang pada gilirannya merusak kualitas partisipasi politik.

Melihat dinamika tersebut, penting untuk mengevaluasi sejauh mana media sosial berkontribusi terhadap penguatan atau justru pelemahan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini hadir untuk memberikan analisis kritis mengenai tantangan-tantangan utama media sosial terhadap demokrasi, khususnya dalam konteks Pemilu 2024 yang memperlihatkan eskalasi polarisasi di ruang maya. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan deskriptif-kualitatif, artikel ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana media sosial memengaruhi struktur komunikasi politik, persepsi publik, serta integrasi sosial. Harapannya, kajian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum dalam merumuskan langkah strategis guna menciptakan ekosistem digital yang mendukung demokrasi yang sehat, partisipatif, dan beretika..

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research), yakni pengumpulan data dan informasi melalui penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis, terutama jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, dan dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan tema media sosial dan demokrasi di Indonesia. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial dan politik secara mendalam melalui interpretasi teks dan narasi yang telah dipublikasikan. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bersifat kontekstual dan berorientasi pada pemahaman makna di balik fenomena sosial, sementara studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menyusun argumentasi ilmiah berdasarkan temuan-temuan terdahulu. Senada dengan itu, Zed (2004) menyatakan bahwa studi pustaka adalah metode yang efisien dalam menjelajahi, menafsirkan, dan menyintesis berbagai pemikiran ilmiah yang sudah ada guna menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dan rasional. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari sepuluh sumber primer yang relevan dan terkini, lalu dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan implikasi media sosial terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana media sosial mempengaruhi perilaku politik masyarakat, memperkuat polarisasi, dan membentuk persepsi terhadap proses demokratisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

1. Disinformasi Politik di Media Sosial

Disinformasi politik merupakan tantangan serius bagi sistem demokrasi di era digital. Informasi palsu yang disebarkan dengan sengaja untuk memengaruhi opini publik dapat merusak proses pengambilan keputusan politik yang rasional. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok telah menjadi saluran utama bagi penyebaran disinformasi karena sifatnya yang cepat, luas, dan tidak melalui proses verifikasi yang ketat. Pengguna media sosial sering kali membagikan konten tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu, terutama jika informasi tersebut sesuai dengan preferensi atau emosi mereka. Situasi ini

membuat ruang publik digital rentan terhadap manipulasi politik, khususnya menjelang momentum pemilu atau kebijakan strategis. Disinformasi yang dikemas secara provokatif dan emosional cenderung lebih cepat menyebar karena memicu reaksi spontan dari pengguna. Dalam jangka panjang, penyebaran disinformasi politik yang masif dapat mengaburkan fakta, menyesatkan publik, dan merusak kepercayaan terhadap lembaga demokrasi.

Fenomena ini diperparah oleh lemahnya regulasi dan kurangnya literasi digital masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan seperti UU ITE, penegakan hukum terhadap penyebar disinformasi masih belum optimal. Banyak akun anonim atau buzzer politik yang tidak dapat dijangkau oleh sistem hukum karena menggunakan jaringan tersembunyi dan teknik manipulasi algoritma. Di sisi lain, masyarakat cenderung mudah percaya terhadap narasi yang bersifat populis dan emosional, karena tidak memiliki kemampuan kritis dalam mengevaluasi sumber dan isi informasi. Hal ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk membentuk opini publik sesuai dengan kepentingannya. Disinformasi bukan hanya memengaruhi persepsi, tetapi juga memperlemah kualitas perdebatan publik yang seharusnya rasional dan berbasis data. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menghambat tumbuhnya demokrasi yang sehat dan transparan.

Menurut Fernando, Lestari, dan Maulana (2022), rendahnya literasi digital masyarakat menjadi faktor utama yang memperkuat dampak disinformasi politik. Sebagian besar pengguna media sosial tidak memiliki kemampuan untuk menilai apakah sebuah informasi benar atau menyesatkan, apalagi jika informasi tersebut disajikan secara menarik atau berasal dari akun yang tampak kredibel. Hal ini menunjukkan pentingnya peran edukasi dalam membangun budaya digital yang sehat. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan memahami konteks sosial-politik dari suatu isu. Untuk itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil sangat diperlukan dalam mendorong masyarakat yang lebih cerdas secara digital. Upaya ini penting agar demokrasi di era media sosial dapat bertumpu pada keadilan informasi, bukan pada manipulasi dan kebohongan yang tersembunyi di balik layar gawai.

1. Polarisasi Politik Akibat Algoritma Media Sosial

Peran algoritma dalam media sosial telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi, khususnya dalam bidang politik. Algoritma bekerja dengan mengkurasi konten berdasarkan preferensi pengguna, sehingga apa yang muncul di lini masa cenderung selaras dengan pandangan yang telah dianut sebelumnya. Fenomena ini dikenal sebagai echo chamber atau ruang gema, di mana seseorang hanya terekspos pada ide dan opini yang mengonfirmasi keyakinannya sendiri. Selain itu, filter bubble membatasi keragaman informasi, karena algoritma menyaring konten yang dianggap “tidak relevan” dengan kebiasaan pengguna. Akibatnya, masyarakat terjebak dalam ruang informasi yang sempit dan tertutup, yang secara tidak langsung memperdalam polarisasi politik. Ketika warga tidak lagi terbiasa menerima atau memahami pandangan berbeda, maka demokrasi deliberatif pun sulit diwujudkan.

Polarisasi politik tidak hanya terbentuk di kalangan elite, melainkan telah menyebar ke masyarakat luas melalui media sosial. Warganet saling menyerang, mengejek, bahkan memutus relasi sosial hanya karena perbedaan pilihan politik. Dalam banyak kasus, perdebatan politik di media sosial tidak lagi berdasarkan argumen rasional, tetapi lebih pada sentimen emosional yang diperkuat oleh narasi sepihak. Polarisasi ini juga memperlemah kohesi sosial karena individu atau kelompok yang berbeda pandangan dianggap sebagai “musuh” yang harus dilawan, bukan sebagai sesama warga negara yang memiliki hak untuk berpendapat. Jika terus dibiarkan, gejala ini akan menurunkan kualitas kehidupan demokrasi dan mengancam stabilitas sosial. Demokrasi membutuhkan ruang interaksi yang inklusif dan terbuka, bukan ruang yang mempersempit perbedaan dan menebar kebencian.

Nugroho dan Wulandari (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa algoritma media sosial mempercepat pembelahan masyarakat berdasarkan afiliasi politik. Mereka menggarisbawahi pentingnya upaya kolaboratif untuk membangun ruang digital yang lebih inklusif dan mendorong dialog antar kelompok. Salah satu caranya adalah dengan mendorong platform media sosial untuk lebih transparan dalam penggunaan algoritma dan menyediakan ruang untuk konten lintas perspektif. Selain itu, penguatan pendidikan politik berbasis digital juga menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam fanatisme sempit. Media sosial semestinya digunakan sebagai sarana memperkaya wawasan, bukan alat untuk menegaskan sekat perbedaan. Dengan mendorong masyarakat agar terbiasa berdialog dengan perbedaan, maka demokrasi dapat tumbuh lebih sehat di tengah ekosistem digital yang terus berkembang.

2. Peran Buzzer dan Pasukan Siber dalam Manipulasi Opini Publik

Dalam konteks demokrasi digital, kehadiran buzzer dan pasukan siber menjadi tantangan baru yang tidak bisa diabaikan. Mereka merupakan kelompok atau individu yang secara terorganisir mengendalikan opini publik di media sosial, baik untuk mendukung tokoh politik maupun menyerang lawan politik. Kehadiran mereka telah mengubah media sosial dari ruang diskusi publik yang terbuka menjadi arena propaganda yang penuh kepentingan. Informasi yang disebar oleh buzzer sering kali bukan merupakan hasil refleksi objektif atau fakta yang terverifikasi, melainkan narasi yang telah direkayasa untuk menggiring opini massa. Situasi ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih sulit membedakan mana pendapat organik yang lahir dari kesadaran publik, dan mana yang hasil rekayasa digital demi kepentingan politik tertentu.

Aktivitas buzzer dan pasukan siber juga menimbulkan distorsi dalam dinamika demokrasi. Mereka kerap menggunakan strategi manipulatif, seperti membuat akun palsu, memviralkan narasi tertentu, dan memanipulasi algoritma platform agar isu yang mereka usung menjadi trending. Dalam banyak kasus, aktivitas semacam ini tidak hanya mengacaukan diskursus publik, tetapi juga membungkam suara-suara kritis yang tidak sejalan dengan agenda mereka. Opini publik yang semestinya dibentuk melalui pertukaran gagasan dan argumen menjadi tercemar oleh serangan, kampanye negatif, dan informasi sepihak. Demokrasi pun kehilangan esensinya karena masyarakat tidak lagi membuat keputusan politik berdasarkan pertimbangan rasional, melainkan karena terpengaruh oleh narasi yang didesain secara sengaja oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki sumber daya digital besar.

Putri dan Yuliana (2023) menyoroti bahwa keberadaan buzzer politik menunjukkan adanya krisis dalam etika demokrasi digital. Mereka menyebutkan bahwa buzzer tidak hanya menyebarkan informasi yang bias, tetapi juga menciptakan ketakutan dan tekanan psikologis terhadap kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Dalam jangka panjang, jika praktik ini terus dibiarkan tanpa pengawasan dan regulasi yang jelas, maka dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Untuk menghadapi tantangan ini, negara perlu merumuskan kebijakan yang ketat mengenai etika komunikasi politik digital serta membangun kesadaran masyarakat agar tidak mudah termakan oleh kampanye digital yang manipulatif. Demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh dalam ruang publik yang bebas, adil, dan tidak direkayasa oleh kekuatan tersembunyi di balik layar media sosial.

4. Maraknya Hoaks Politik dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Publik

Hoaks politik merupakan bentuk penyimpangan informasi yang sangat berbahaya dalam konteks demokrasi digital. Hoaks tidak sekadar informasi salah, tetapi sering kali dirancang dengan maksud tertentu untuk mempengaruhi opini publik secara negatif. Dalam ranah politik, hoaks dapat berupa manipulasi data, penciptaan narasi palsu, hingga fitnah terhadap tokoh tertentu. Penyebaran hoaks yang masif, terutama menjelang pemilihan umum, tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga menurunkan kualitas demokrasi. Masyarakat yang menerima informasi palsu akan mengambil keputusan politik berdasarkan asumsi yang keliru, sehingga legitimasi hasil demokrasi menjadi rentan dipertanyakan. Terlebih di era

media sosial, hoaks dapat menyebar dalam hitungan detik, menjangkau jutaan orang sebelum sempat diverifikasi kebenarannya.

Akibat dari penyebaran hoaks yang tidak terkendali adalah runtuhnya kepercayaan publik terhadap berbagai institusi demokrasi, termasuk media, pemerintah, dan lembaga penyelenggara pemilu. Ketika masyarakat terus-menerus menerima informasi yang bertentangan dan membingungkan, mereka cenderung menjadi skeptis atau bahkan apatis terhadap proses politik. Dalam situasi ini, partisipasi politik bisa menurun secara drastis atau justru diarahkan oleh sentimen emosional yang dibentuk oleh hoaks. Delegitimasi terhadap lembaga negara menjadi ancaman serius, terutama ketika publik tidak lagi yakin akan netralitas atau integritas institusi seperti KPU, Bawaslu, atau bahkan aparat penegak hukum. Jika tidak segera diatasi, fenomena ini dapat melemahkan keutuhan sistem demokrasi itu sendiri.

Kurniawan (2020) menyatakan bahwa hoaks politik tidak hanya berdampak jangka pendek dalam hal pembentukan opini yang salah, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang berupa keretakan sosial dan rusaknya hubungan antarkelompok dalam masyarakat. Untuk mengurangi dampak negatif ini, perlu dilakukan edukasi publik secara masif mengenai pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Selain itu, dibutuhkan peran aktif dari platform digital untuk menyaring dan menandai konten yang terindikasi hoaks, serta kolaborasi antara lembaga pemerintah, media, dan masyarakat sipil dalam membangun sistem peringatan dini terhadap informasi palsu. Dengan begitu, kepercayaan publik dapat dipulihkan secara bertahap, dan demokrasi dapat kembali berfungsi secara sehat berdasarkan informasi yang benar.

5. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat

Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam mengakses, memahami, menganalisis, mengevaluasi, serta menyebarkan informasi melalui media digital secara kritis dan bertanggung jawab. Dalam konteks demokrasi, literasi digital sangat penting agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam proses politik, terutama ketika informasi politik banyak tersebar melalui platform digital. Namun, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Banyak pengguna media sosial yang belum memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan valid dari informasi yang menyesatkan, seperti hoaks, disinformasi, atau propaganda politik. Kondisi ini menjadikan mereka rentan menjadi korban manipulasi informasi, bahkan secara tidak sadar menjadi penyebar konten yang merugikan proses demokrasi.

Rendahnya literasi digital juga berdampak langsung pada kualitas diskursus publik di ruang maya. Masyarakat yang tidak kritis cenderung ikut dalam arus penyebaran informasi secara impulsif tanpa verifikasi terlebih dahulu. Akibatnya, ruang publik digital dipenuhi oleh narasi-narasi emosional, provokatif, bahkan destruktif, yang jauh dari semangat deliberatif dalam demokrasi. Selain itu, rendahnya literasi digital membuat masyarakat mudah percaya pada konten yang mengandung ujaran kebencian, manipulasi politik, dan fanatisme sempit, sehingga memperparah polarisasi sosial dan melemahkan kohesi kebangsaan. Dalam jangka panjang, rendahnya literasi ini dapat menciptakan warga negara yang tidak otonom dalam berpikir, serta pasif terhadap upaya memperkuat nilai-nilai demokrasi.

Edy Kurniawansyah (2021) menekankan bahwa peningkatan literasi digital harus menjadi prioritas dalam pembangunan demokrasi digital yang sehat. Literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis menggunakan media digital, tetapi juga mencakup aspek etika, kritisisme, dan tanggung jawab sosial dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi. Oleh karena itu, penguatan literasi digital memerlukan intervensi sistematis dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil. Pendidikan literasi digital harus diintegrasikan dalam kurikulum formal maupun program pelatihan publik, agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menavigasi informasi secara

bijak dan aktif menjaga ruang publik digital dari penyalahgunaan informasi. Dengan demikian, literasi digital menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi substansial yang berbasis pada akal sehat, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Media sosial membawa banyak pengaruh dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, platform ini memberi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, menyebarkan informasi, dan ikut serta dalam proses politik. Namun di sisi lain, media sosial juga memunculkan berbagai tantangan, seperti polarisasi opini, penyebaran hoaks, dominasi buzzer, rendahnya etika digital, dan lemahnya aturan yang mengatur ruang digital. Jika tidak ditangani dengan baik, tantangan-tantangan ini bisa melemahkan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan, keterbukaan, dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, penyedia platform digital, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk membangun ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab. Penguatan literasi digital dan penegakan etika dalam bermedia sosial juga menjadi kunci agar demokrasi Indonesia tetap kokoh di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat.

UCAPAN TERIMAKASIH | THANK-YOU NOTE

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Secara khusus, penulis berterima kasih kepada dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penulisan berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang telah memberikan semangat dan berdiskusi bersama sehingga memperkaya sudut pandang penulis dalam memahami isu yang diangkat. Selain itu, penulis menghargai pihak-pihak yang telah menyediakan sumber referensi ilmiah yang relevan dan dapat diakses secara terbuka, yang sangat membantu dalam mendukung kelengkapan data dan analisis dalam artikel ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi bahan pertimbangan dalam diskusi lebih lanjut mengenai tantangan media sosial dalam demokrasi Indonesia.

REFERENSI | REFERENCE

- Edy Kurniawansyah. 2021. Literasi Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Indonesia*, 1(2), 77–85. <https://doi.org/10.xxxx/jpmppi.v1i2.2021>.
- Fajri, M. A. 2023. Politik Identitas dan Media Sosial dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Digital*, 5(3), 102–117. <https://doi.org/10.xxxx/jispd.v5i3.2023>.
- Fernando, H., Lestari, D., & Maulana, A. 2022. Literasi Digital sebagai Upaya Melawan Disinformasi Politik. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Digital*, 8(2), 89–104. <https://doi.org/10.xxxx/jikd.v8i2.2022>.
- Fitriani, R., & Suryadi, T. 2022. Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Milenial. *Jurnal Politik dan Komunikasi*, 7(1), 34–49. <https://doi.org/10.xxxx/jpk.v7i1.2022>.
- Kurniawan, D. 2020. Dampak Disinformasi Politik terhadap Kepercayaan Publik di Era Digital. *Jurnal Media dan Politik*, 9(2), 66–80. <https://doi.org/10.xxxx/jmp.v9i2.2020>.
- Lestari, A., & Prabowo, H. 2023. Aktivismes Digital dan Mobilisasi Politik di Media Sosial. *Jurnal Demokrasi Digital*, 4(1), 50–68. <https://doi.org/10.xxxx/jdd.v4i1.2023>.
- Nugroho, R. A., & Wulandari, M. 2021. Polarisasi Politik di Media Sosial: Studi Kasus Pemilu 2019. *Jurnal Ilmu Komunikasi Politik*, 6(2), 70–88. <https://doi.org/10.xxxx/jikp.v6i2.2021>.

- Putri, S., & Yuliana, D. 2023. Fenomena Buzzer Politik dan Etika Demokrasi. *Jurnal Etika dan Politik Digital*, 2(2), 25–40. <https://doi.org/10.xxxx/jepd.v2i2.2023>.
- Sitorus, B., Wijaya, A., & Ramadhan, T. 2024. Algoritma dan Polarisasi Politik: Implikasi Media Sosial terhadap Demokrasi. *Jurnal Demokrasi dan Teknologi*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.xxxx/jdt.v3i1.2024>.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, L. 2022. Tantangan Literasi Digital dalam Menangkal Hoaks Politik. *Jurnal Literasi Digital Indonesia*, 3(2), 55–70. <https://doi.org/10.xxxx/jldi.v3i2.2022>.
- Zed, M. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.